



**PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
INSPEKTORAT DAERAH**

JLN.EL-TARI NO. 1 TELP. (0382) 21296 FAX. 23547
MAUMERE

KODE POS : 86112

**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH**

**Nomor : Insp.700.121/37.b/LHE/PKPT/ITKAB/SKA/2025
Tanggal : 30 September 2025**

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar hukum pelaksanaan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 Tanggal 04 Maret 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Bupati Sikka Nomor 101/HK/2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Resiko Tahun Anggaran 2024;
10. Surat Tugas Inspektur Kabupaten Sikka Nomor : 236/SPT/ITKAB/SKA/2024 tanggal 5 Agustus 2024 dengan susunan tim sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Nama | : Petrus Digabari Fernandez, SH |
| NIP. | : 19680612 199803 1 010 |
| Pangkat/Gol. Ruang | : Pembina TK.I / IV-b |
| Jabatan | : Inspektur Pembantu V/Pengendali Teknis |

2. Nama : Alfredo I.M. Meak
NIP. : 19780421 201001 1 018
Pangkat/Gol.Ruang : Penata TK.I / III-d
Jabatan : Auditor Muda/Anggota Tim 1
3. Nama : Isdara Panangian Rohi, SE
NIP. : 19951205 201903 1 005
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda / III-b
Jabatan : Auditor Pertama/Anggota Tim 2

B. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan, konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

C. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP. Tujuan evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai

dengan kebijakan atas implementasi SAKIP yang ditetapkan. Tujuan dan Sasaran evaluasi sangat bergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada.

Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja.

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain :

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempumaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

E. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan

dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada.

Teknik evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP antara lain :

1. Cheklist Pengumpulan Data dan Informasi

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara mandiri.

2. Komunikasi melalui Tanya Jawab

Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Komunikasi dilakukan dengan wawancara secara langsung dan melalui media telekomunikasi. yang tersedia seperti telepon dan *chat*, melalui *whatsapp*.

F. Gambaran Umum Evalutan

Profil Administrasi Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka adalah sebagai berikut :

1. Kelembagaan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, merupakan unsur pelaksana bidang Penanggulangan Bencana yang dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Sikka melalui Sekretaris Daerah selaku *ex. Officio* Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka.

2. Data Obyek yang dievaluasi.

a. Data Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- 1) Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka
- 2) Alamat Kantor : Jl. Mawar No. 28, Maumere, NTT
- 3) Nomor Telepon/Fax : -

b. Dasar Pembentukan : Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 52 Tahun 2016.

c. Pimpinan SKPD

- 1) N a m a : JOHANES B.C. PUTU BOTHA, ST
- 2) N i p : 19741115 200012 1 005

- 3) Pangkat/Golongan/Ruang : Pembina Utama Muda /IV-C
4) J a b a t a n : Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Sikka

3. Visi dan Misi

a. Visi

"Terpenuhinya Hak-hak dasar masyarakat menuju Sikka Bahagia 2025"

b. Misi

- 1). Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas
- 2). Mewujudkan Reformasi Birokrasi

4. Tugas dan Fungsi

a. Tugas

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanggulangan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. Pengoordinasian pelaksana kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
3. Pengelolaan urusan ketatausahaan.

G. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024.

Dari hasil evaluasi disimpulkan beberapa kondisi implementasi Sistem AKIP sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi atas perencanaan kinerja memperoleh nilai 25,20 dari bobot 30,00 yang meliputi evaluasi atas ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi atas kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi atas pemanfaatan dokumen perencanaan.

2. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi atas pengukuran kinerja memperoleh nilai 24,60 dari bobot 30,00 yang meliputi evaluasi atas ketersediaan dokumen pengukuran kinerja, evaluasi atas kualitas dokumen pengukuran kinerja dan evaluasi atas pemanfaatan dokumen pengukuran kinerja.

3. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi atas pelaporan kinerja memperoleh nilai 13,50 dari bobot 15,00 yang meliputi evaluasi atas ketersediaan dokumen laporan yang menggambarkan kinerja, evaluasi atas dokumen laporan yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja dan evaluasi atas pemanfaatan pelaporan kinerja..

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja internal memperoleh nilai 8,75 dari bobot 25,00 yang meliputi evaluasi atas ketersediaan dokumen, evaluasi atas kualitas sumber daya dan evaluasi atas pemanfaatan akuntabilitas kinerja internal.

BAB II

GAMBARAN HASIL EVALUASI

Hasil evaluasi atas implementasi Sistem AKIP yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan *range* nilai 0 s.d 100, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka memperoleh capaian sebesar **72,05** dengan kategori **BB (SANGAT BAIK)**. Artinya Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Kategori ini merupakan kategori ke 3 (empat) dari 7 (tujuh) kategori yang dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90 s/d 100	SANGAT MEMUASKAN Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif dan efisien (Reform). Pengukuran Kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2	A	>80 s/d 90	MEMUASKAN Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Sub kordinator).
3	BB	>70 s/d 80	SANGAT BAIK Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang ada dan berbasis teknologi informasi serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
4	B	>60 s/d 70	BAIK Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat

			masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
5	CC	> 50 s/d 60	CUKUP (MEMADAI) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6	C	> 30 s/d 50	KURANG Sistem dan tatanan AKIP yang kurang dapat diandalkan., Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	D	>0 – 30	SANGAT KURANG Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.

Capaian sebesar 72,05 tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, dengan rincian sebagai berikut :

Evaluasi lebih lanjut per komponen atas implementasi Sistem AKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka adalah sebagai berikut :

A. Hasil Evaluasi

1. Perencanaan Kinerja

a. Kondisi Pemenuhan Dokumen Perencanaan Kinerja

- 1) Telah tersedia pedoman teknis perencanaan kinerja.
- 2) Telah ada dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.
- 3) Telah ada dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.
- 4) Telah ada dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.

- 5) Telah ada dokumen perencanaan aktifitas yang mendukung kinerja.
 - 6) Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.
- Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen perencanaan kinerja disimpulkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka telah memenuhi seluruh kriteria (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 1 (satu) tahun terakhir dengan predikat "A" (nilai 5,4 dari bobot 6,00).

b. Kondisi Kualitas Perencanaan Kinerja

- 1) Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.
- 2) Dokumen Perencanaan Kinerja **belum** dipublikasikan tepat waktu.
- 3) Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.
- 4) Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.
- 5) Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.
- 6) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).
- 7) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.
- 8) Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).
- 9) Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).
- 10) Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.
- 11) Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.

Hasil evaluasi atas kualitas perencanaan kinerja disimpulkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka telah memenuhi seluruh kriteria (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut dengan predikat "B" (nilai 6,3 dari bobot 9,00)

c. Kondisi Pemanfaatan Perencanaan Kinerja

- 1) Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.
- 2) Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.
- 3) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track.
- 4) Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.
- 5) Telah ada perbaikan/ penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil evaluasi SAKIP sebelumnya.
- 6) Telah ada perbaikan/ penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.
- 7) Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
- 8) Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

Hasil evaluasi atas pemanfaatan perencanaan kinerja disimpulkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka telah memenuhi seluruh kriteria (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut dengan predikat "A" (nilai 13,5 dari bobot 15,00).

2. Pengukuran Kinerja

a. Kondisi Pemenuhan Dokumen Pengukuran Kinerja

- 1) Belum terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.
- 2) Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.
- 3) Belum terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen pengukuran kinerja disimpulkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka belum memenuhi seluruh kriteria dengan predikat "C" (nilai 3 dari bobot 6,00).

b. Kondisi Kualitas Pengukuran Kinerja

- 1) Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja.
- 2) Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.
- 3) Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.
- 4) Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.
- 5) Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.
- 6) Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).
- 7) Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).

Hasil evaluasi atas kualitas pengukuran kinerja disimpulkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka telah memenuhi seluruh kriteria (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut dengan predikat "A" (nilai 8,10 dari bobot 9,00)

c. Kondisi Pemanfaatan Pengukuran Kinerja

- 1) Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (perubahan/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.
- 2) Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.
- 3) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.
- 4) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.
- 5) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.
- 6) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.
- 7) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.

- 8) Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.
 - 9) Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
 - 10) Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
- Hasil evaluasi atas pemanfaatan pengukuran kinerja disimpulkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka telah memenuhi seluruh kriteria (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut dengan predikat "A" (nilai 13,5 dari bobot 15,00).

3. Pelaporan Kinerja

a. Kondisi Pemenuhan Dokumen Pelaporan Kinerja.

- 1) Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.
- 2) Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.
- 3) Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.
- 4) Dokumen Laporan Kinerja (LKjIP telah direviu
- 5) Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.
6. Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen pelaporan kinerja disimpulkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka telah memenuhi seluruh kriteria (100%) dengan predikat "A" (nilai 2,7 dari bobot 3,00).

b. Kondisi Kualitas Pelaporan Kinerja

- 1) Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.
- 2) Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.
- 3) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.
- 4) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.
- 5) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.

- 6) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).
- 7) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.
- 8) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
- 9) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).

Hasil evaluasi atas kualitas pelaporan kinerja disimpulkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka sebagian besar kriteria telah terpenuhi dengan predikat "A" (nilai 4,05 dari bobot 4,50).

c. Kondisi Pemanfaatan Pelaporan Kinerja

- 1) Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).
- 2) Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.
- 3) Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja
- 4) Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja
- 5) Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.
- 6) Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
- 7) Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

Hasil evaluasi atas pemanfaatan pelaporan kinerja disimpulkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka telah memenuhi seluruh kriteria (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut dengan predikat "A" (nilai 6,75 dari bobot 7,50).

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

a. Kondisi Pemenuhan Dokumen Evaluasi Akuntabilitas Internal

- 1) Belum terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
- 2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan oleh pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.
- 3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan secara berjenjang.

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen evaluasi akuntabilitas internal disimpulkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka belum memenuhi seluruh kriteria dengan predikat "C" (nilai 2,5 dari bobot 5,00).

b. Kondisi Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- 1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan sesuai standar.
- 2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan Oleh SDM yang memadai.
- 3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.
- 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.
- 5) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).

Hasil evaluasi atas kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal dapat disimpulkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka belum memenuhi seluruh kriteria dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut dengan predikat "E" (nilai 0 dari bobot 7,50)

c. Kondisi Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- 1) Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum ditindaklanjuti.
- 2) Tidak terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal.

- 3) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal tidak dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- 4) Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal tidak dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.
- 5) Tidak terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Hasil evaluasi atas pemanfaatan evaluasi akuntabilitas kinerja internal disimpulkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka belum memenuhi seluruh kriteria dengan predikat "C" (nilai 6,25 dari bobot 12,50).

B. Rekomendasi Tindak Lanjut

Sehubungan dengan hal-hal yang ditemukan dalam evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024, kami merekomendasikan agar :

- 1) Dokumen Perencanaan Kinerja dipublikasikan tepat waktu.
- 2) Membuat SOP dan Pedoman Teknis Pengumpulan Data kinerja
- 3) Laksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
- 4) Laksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai
- 5) Membuat dan menindaklanjuti Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

BAB III

PENUTUP

Penyelenggaraan SAKIP pada perangkat daerah dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah. Pimpinan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing perangkat daerah. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk meningkatkan Implementasi SAKIP di instansi yang dipimpin sehingga memberikan motivasi kepada bawahan untuk saling bersinergi antara unit kerja yang ada dalam organisasi sehingga tujuan organisasi instansi dapat tercapai optimal yang pada akhirnya memperbaiki manajemen kinerja dan meningkatkan akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah secara berkelanjutan. Pemberian reward dan punishment dapat mendorong dan memberikan motivasi bagi bawahan untuk menghasilkan kinerja yang lebih optimal.

A. Kesimpulan

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka tahun 2024 adalah 72,06 termasuk dalam kategori "BB" (SANGAT BAIK) dan Implementasi SAKIP telah meningkat dari tahun sebelumnya.

Total nilai AKIP hasil Evaluasi Implementasi SAKIP tahun ini (2024) lebih tinggi dari tahun sebelumnya ("63,30"), namun tidak dapat disandingkan sebagai perbandingan, karena adanya perubahan komponen/Sub Komponen penilaian sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Saran

Diharapkan rekomendasi yang disampaikan segera dapat ditindaklanjuti. Melakukan perbaikan Implementasi SAKIP, mempertahankan nilai yang telah baik, meningkatkan nilai yang belum memuaskan sehingga meningkatkan hasil penilaian AKIP dimasa yang akan datang.

Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai tentang Implementasi SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka.

INSPEKTOR KABUPATEN SIKKA


Drs. Servasius Seward
Pembina Utama Muda
NIP.19650916 199412 1 003